

## PENAFIAN

LSM Koalisi Hutan UK telah menerjemahkan dokumen-dokumen konsultasi tentang uji tuntas yang kami terima dari DEFRA: <https://consult.defra.gov.uk/international-biodiversity-and-climate/implementing-due-diligence-forest-risk-commodities/>. Ini dilakukan secara sukarela dan independen dari pemerintah UK untuk membantu para mitra kami dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain yang tidak dihubungi secara langsung oleh pemerintah.

Meskipun kami telah berupaya melakukannya dengan seteliti mungkin, kami tidak dapat menjamin keakuratan terjemahan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau penghapusan yang terjadi dalam proses penerjemahan.

### Catat:

Jika Anda bermaksud mengirimkan respons, kirimkan langsung kepada pemerintah UK, dengan mengikuti petunjuk dalam dokumen-dokumen konsultasi, karena kami tidak akan dapat mengirimkannya atas nama Anda;

Kami memahami bahwa pemerintah UK mewajibkan semua respons dibuat dalam bahasa Inggris, dan Anda harus menyiapkannya sendiri. Sayangnya, Koalisi tidak dapat menyediakan penerjemahan dari respons.

Kami menerima jika terjemahan ini dibagikan kepada pihak lain, tetapi harus dibagikan dengan dasar sebagaimana disebutkan di atas.

---



Department  
for Environment  
Food & Rural Affairs

# Melaksanakan uji tuntas atas komoditas hutan berisiko Dokumen konsultasi

Desember 2021



© Hak Cipta Crown 2020

Informasi ini memiliki lisensi Open Government Licence v3.0. Untuk melihat lisensi ini, kunjungi [www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/](http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)

Publikasi ini tersedia di [www.gov.uk/government/publications](http://www.gov.uk/government/publications)

Pertanyaan apa pun tentang publikasi ini harus dikirimkan kepada kami di

[Due.Diligence@defra.gov.uk](mailto:Due.Diligence@defra.gov.uk)

[www.gov.uk/defra](http://www.gov.uk/defra)

## Daftar Isi

Pendahuluan.....	1
Latar Belakang .....	1
Bagaimana dan mengapa kami berkonsultasi?.....	2
Merespons konsultasi.....	2
Kerahasiaan dan perlindungan data.....	3
Tentang Anda.....	4
Tentang organisasi Anda .....	4
Tentang bisnis Anda.....	4
Melaksanakan persyaratan uji tuntas .....	7
Komoditas hutan berisiko.....	9
Mengidentifikasi komoditas utama dalam lingkup .....	9
Rangkaian legislasi .....	10
Putaran pertama peraturan pelaksanaan .....	11
Perusahaan-perusahaan dalam lingkup .....	13
Definisi omzet.....	13
Mengatur perusahaan-perusahaan yang berbasis di UK dan beroperasi di UK.....	14
Mengatur perusahaan-perusahaan yang tidak berbasis di UK dan beroperasi di UK ....	14
Tingkat ambang batas omzet .....	16
Pengecualian .....	18
Ambang pengecualian.....	19
Menghitung volume komoditas yang digunakan .....	19
Tingkat ambang batas pengecualian.....	21
Pertanyaan tambahan untuk responden perusahaan.....	24
Sistem uji tuntas .....	25

Tingkat mitigasi risiko .....	25
Panduan sistem uji tuntas .....	27
Skema dan standar sertifikasi .....	28
Bukti lebih lanjut untuk menginformasikan persyaratan sistem uji tuntas.....	31
Pelaporan tahunan .....	32
Penegakan.....	33
Menetapkan otoritas penegakan .....	33
Gambaran skema penegakan .....	34

# Pendahuluan

## Latar belakang

1. Mengetahui dampak yang terjadi pada hutan-hutan dunia yang diakibatkan oleh tingkat konsumsi di UK, pada 2019 Pemerintah UK meminta Gugus Tugas independen - Global Resource Initiative (GRI) – untuk memberikan rekomendasi spesifik kepada Pemerintah UK tentang mengatasi masalah tersebut. GRI mengirimkan laporan pertamanya pada Maret 2020<sup>1</sup>. GRI merekomendasikan agar Pemerintah UK menerapkan persyaratan uji tuntas wajib dalam rantai pasok mereka kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan ‘komoditas hutan berisiko’ – komoditas yang produksinya terkait dengan deforestasi skala luas .
2. Setelah konsultasi pada Agustus 2020 dan berdasarkan rekomendasi dari GRI, Pemerintah UK menerapkan legislasi terkemuka di dunia melalui UU Lingkungan untuk mengatasi deforestasi ilegal dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan UK. Ini adalah satu bagian dari paket langkah yang lebih luas untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok kita dan akan berkontribusi pada berbagai upaya dunia untuk melindungi hutan dan ekosistem lainnya.
3. Ketentuan UU Lingkungan akan mengilegalkan penggunaan oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di UK atas komoditas hutan berisiko utama yang diproduksi di atas lahan yang ditempati atau digunakan secara ilegal. Peraturan Kayu UK sudah melarang penempatan kayu dan produk kayu yang ditebang secara ilegal di pasar UK. Untuk menghindari tumpang tindih dengan skema ini, produk-produk ini tidak masuk ke dalam lingkup ketentuan baru ini.
4. Perusahaan-perusahaan dalam lingkup akan juga diwajibkan untuk melakukan uji tuntas pada rantai pasok mereka, untuk menilai dan memitigasi risiko komoditas yang diatur yang telah diproduksi di atas lahan yang dimiliki dan digunakan secara ilegal, dan untuk melaporkan pelaksanaan ini setiap tahun. Untuk memastikan transparansi, informasi tentang pelaksanaan uji tuntas perusahaan akan dipublikasikan. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam lingkup dan tidak mematuhi ketentuan ini dapat dijatuhi denda atau sanksi perdata lainnya.
5. UU ini akan membantu kita memastikan tidak ada tempat di rak supermarket kita untuk komoditas yang ditumbuhkan di atas lahan yang ditempati atau digunakan secara ilegal dan untuk membantu negara-negara lain memperkuat dan menegakkan langkah-langkah perlindungan hutan mereka.
6. Setelah peraturan ini dilaksanakan, Pemerintah UK berdasarkan UU Lingkungan diminta untuk mengevaluasi dampak legislasi ini setiap dua tahun. Ini akan memungkinkan kami untuk memastikan bahwa legislasi ini dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan untuk melakukan perubahan jika kami tidak melihat tindakan.

---

<sup>1</sup> 6 Global Resource Initiative. (2020), [Laporan Akhir](#)

## Bagaimana dan mengapa kami berkonsultasi?

7. Peraturan pelaksanaan wajib diadakan untuk melaksanakan persyaratan uji tuntas yang ditetapkan dalam UU Lingkungan. Untuk melengkapi ini, kami juga akan menerbitkan panduan bagi Perusahaan-perusahaan tentang cara mematuhi peraturan. Khususnya, peraturan pelaksanaan (didukung dengan panduan pendampingnya) akan menetapkan:
  - komoditas mana yang akan masuk dalam lingkup peraturan
  - perusahaan mana yang harus tunduk pada persyaratan ini
  - perusahaan apa yang masuk dalam lingkup yang akan diwajibkan untuk melakukan dan melaporkan terkait dengan pelaksanaan uji tuntas mereka; dan
  - cara penegakan ketentuan ini
8. Konsultasi ini berupaya memperoleh pendapat tentang area-area utama sebelum penyusunan peraturan pelaksanaan dan panduan. Kami juga tertarik untuk menyusun bukti untuk membantu kami merancang langkah-langkah yang proporsional dan memaksimalkan dampak: menargetkan perusahaan-perusahaan dengan pengaruh terbesar dalam rantai pasok komoditas sekaligus meminimalkan beban yang ditanggung kepada perusahaan.
9. Karena kami memiliki fleksibilitas untuk memasukkan komoditas melalui berbagai putaran peraturan pelaksanaan, konsultasi ini berfokus untuk mengidentifikasi komoditas mana yang harus diprioritaskan untuk diterapkan dalam legislasi awal.
10. Masalah yang ditangani dalam konsultasi ini dikhususkan untuk Pemerintah UK di Skotlandia dan Wales tetapi dialihkan (didelegasikan) di Irlandia Utara. Namun, Dewan Irlandia Utara telah memberikan persetujuannya agar kewenangan tertentu dalam UU ini dilaksanakan oleh Sekretaris Negara atas nama Dewan, sehingga memungkinkan pelaksanaan ketentuan ini di seluruh UK. Oleh karena itu, konsultasi ini mencakup seluruh UK.

## Menjawab konsultasi

11. Kirim jawaban konsultasi Anda dengan menggunakan survei daring yang disediakan di Citizen Space (Citizen Space adalah alat konsultasi daring). Atau, kirim jawaban Anda ke alamat email [Due.Diligence@defra.gov.uk](mailto:Due.Diligence@defra.gov.uk), atau kirim jawaban Anda via pos ke Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra):

Consultation Coordinator at Defra,  
2nd Floor, Foss House,  
Kings Pool, 1 to 2 Peasholme Green,  
York,  
YO1 7PX

12. Jawaban harus diterima paling lambat pada pukul 23.59, 11 Maret 2022. Konsultasi ini akan berlangsung selama 14 minggu.

## Kerahasiaan dan perlindungan data

13. Ringkasan jawaban konsultasi ini akan dipublikasikan di GOV.UK. Lampiran ringkasan konsultasi akan mencantumkan daftar semua organisasi yang menjawab tetapi tidak akan mencantumkan nama diri, alamat, atau detail kontak lain.
14. Defra dapat memublikasikan konten jawaban konsultasi Anda agar tersedia bagi publik tanpa menyebut nama diri dan detail kontak pribadi Anda (contohnya, alamat rumah, alamat email).
15. Jika Anda mengklik 'Ya' dalam jawaban pertanyaan tentang apakah Anda ingin ada hal yang dirahasiakan dalam jawaban Anda, Anda diminta untuk menyatakan dengan jelas tentang informasi apa yang ingin Anda rahasiakan dan menjelaskan alasan kerahasiaan tersebut.
16. Alasannya adalah informasi dalam jawaban konsultasi dapat dirilis kepada publik sesuai dengan Peraturan Informasi Lingkungan tahun 2004 (EIR) atau UU Kebebasan Informasi tahun 2000 (FOIA), yang harus kami patuhi.
17. Berdasarkan hal ini, penjelasan Anda tentang alasan permintaan kerahasiaan Anda untuk semua atau sebagian jawaban Anda akan membantu kami menyeimbangkan kewajiban pengungkapan dengan kewajiban kerahasiaan.
18. Jika kami menerima permintaan untuk informasi yang telah Anda berikan dalam jawaban konsultasi Anda, kami akan mempertimbangkan penuh alasan permintaan kerahasiaan jawaban Anda, tetapi kami tidak dapat menjamin bahwa kerahasiaan dapat dijaga dalam semua kondisi.
19. Jika Anda mengklik 'Tidak' dalam jawaban pertanyaan tentang apakah Anda ingin ada hal yang dirahasiakan dalam jawaban Anda, kami akan dapat merilis isi jawaban Anda kepada publik, tetapi kami tidak akan memberikan nama diri dan detail kontak pribadi secara terbuka.
20. Defra dapat mengirimkan jawaban Anda kepada Pemerintah yang Menerima Pendelegasian Wewenang (Pemerintah Eksekutif Irlandia Utara, Pemerintah Skotlandia, dan Pemerintah Wales) jika relevan dengan area-area yang diatur oleh Pemerintah tersebut.
21. Ada waktunya Defra akan membagikan informasi yang Anda berikan dalam jawaban konsultasi, termasuk data diri, kepada para analis eksternal. Ini untuk tujuan analisis jawaban konsultasi dan pemberian laporan ringkasan jawaban saja.
22. Konsultasi ini dilakukan sesuai dengan ["Prinsip-Prinsip Konsultasi" Kantor Kabinet](#) .
23. Baca pemberitahuan privasi terkini kami yang diunggah sebagai dokumen terkait beserta dengan dokumen konsultasi kami.
24. Jika Anda memiliki komentar atau keluhan tentang proses konsultasi, kirimkan ke:  
Koordinator Konsultasi uji tuntas tentang komoditas hutan berisiko, Defra  
2nd Floor, Foss House, Kings Pool,  
1 to 2 Peasholme Green  
York  
YO1 7PX
25. Atau email ke: [consultation.coordinator@defra.gov.uk](mailto:consultation.coordinator@defra.gov.uk)

## Tentang Anda

Pertanyaan ke-1. Siapa nama lengkap Anda? Pertanyaan ke-2. Apa alamat email Anda? Pertanyaan ke-3. Di negara mana Anda tinggal?

Pertanyaan ke-4. Apakah Anda ingin jawaban Anda diperlakukan rahasia? Jika ya, sebutkan alasannya.

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-5. Apakah Anda menjawab:

- atas nama organisasi
- sebagai individu

## Tentang organisasi Anda

Ingat bahwa dua pertanyaan berikut ini hanya berlaku jika menjawab atas nama organisasi; jika Pertanyaan ke-5 dalam 'Tentang Anda' = atas nama organisasi. jika Anda menjawab atas nama individu, lanjutkan ke Pertanyaan ke-21.

Pertanyaan ke-6. Jenis organisasi apa yang Anda wakili untuk menjawab?

Untuk tujuan pertanyaan ini, ambang omzet untuk menentukan usaha kecil, menengah, dan besar terdapat dalam UU Perusahaan.

- lembaga pemerintah
- organisasi nonpemerintah
- usaha kecil atau mikro (omzet tahunan kurang dari £10.2 juta)
- usaha menengah (omzet tahunan tidak lebih dari £36 juta)
- usaha besar (omzet tahunan lebih besar dari £36 juta)
- asosiasi industri
- menjawab atas nama jenis organisasi lain

Pertanyaan ke-7. Cantumkan nama organisasi Anda.

## Tentang perusahaan Anda

Ingat bahwa bagian ini untuk responden perusahaan saja; jika Pertanyaan ke-6 dalam 'Tentang organisasi Anda' = usaha kecil atau mikro, usaha menengah, atau usaha besar



Pertanyaan ke-8. Sektor apa yang paling menggambarkan perusahaan Anda?

- pertanian, kehutanan, dan perikanan
- pertambangan, penggalian, dan utilitas
- manufaktur
- konstruksi
- perdagangan grosir dan ritel; reparasi kendaraan bermotor
- transportasi dan penyimpanan (termasuk jasa pos)
- jasa akomodasi dan makanan
- informasi dan komunikasi
- keuangan dan asuransi
- properti
- profesional, ilmiah, dan teknis
- administrasi niaga dan jasa penunjang
- administrasi publik dan pertahanan
- pendidikan
- kesehatan
- seni, hiburan, rekreasi, dan jasa-jasa lain
- lainnya

Pertanyaan ke-9. Di mana letak kantor pusat perusahaan Anda?

- di UK
- di luar negeri

Pertanyaan ke-10. Jika perusahaan Anda berkantor pusat di UK, sebutkan lokasinya.

- Inggris
- Irlandia Utara
- Skotlandia
- Wales

Pertanyaan ke-11. Jika perusahaan Anda berkantor pusat di luar negeri, sebutkan negaranya.

Pertanyaan ke-12. Jika perusahaan Anda berkantor pusat di luar negeri, apakah Anda melakukan kegiatan komersial di UK?

Untuk tujuan pertanyaan ini, 'kegiatan komersial' didefinisikan dalam langkah-langkah uji tuntas dalam UU Lingkungan: (a) produksi, manufaktur, dan pengolahan; (b) distribusi, penjualan, atau suplai; (c) pembelian untuk tujuan dalam butir (a) atau (b), tetapi bukan pembelian sebagai konsumen.

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-13. Di bagian mana di UK perusahaan Anda beroperasi?  
Centang semua yang sesuai.

- Inggris
- Irlandia Utara
- Skotlandia
- Wales
- Tidak ada satu pun dari pilihan di atas

Pertanyaan ke-14. Berapa omzet tahunan perusahaan Anda di UK?

- £0 sampai £10.2 juta
- £10.2 juta sampai £36 juta
- £36 juta sampai £50 juta
- £50 juta sampai £100 juta
- £100 juta sampai £200 juta
- £200 juta sampai £500 juta
- £500 juta ke atas
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-15. Berapa omzet tahunan perusahaan Anda secara global?

(dengan asumsi \$1 USD = £0.77)

- £0 sampai £100 juta
- £100 juta sampai £500 juta
- £500 juta sampai £1 miliar
- £1 miliar sampai £10 miliar
- £10 miliar sampai £50 miliar
- £50 miliar sampai £100 miliar
- £100 miliar ke atas

Pertanyaan ke-16. Apakah perusahaan Anda memiliki perusahaan induk?

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-17. Jika perusahaan Anda memiliki perusahaan induk, beri tahu kami lokasi kantor pusat perusahaan induk Anda.

Pertanyaan ke-18. Jika perusahaan Anda memiliki perusahaan induk, beri tahu kami omzet global tahunan perusahaan induk Anda.

Gunakan mata uang pound sterling (dengan asumsi \$1 USD = £0.77). Jika Anda tidak tahu omzet perusahaan induk Anda, cantumkan 'Tidak tahu'.

Pertanyaan ke-19. Komoditas hutan berisiko mana berikut ini yang Anda gunakan dalam kegiatan komersial Anda di UK? Centang semua yang sesuai.

Untuk tujuan pertanyaan ini, 'kegiatan komersial' sebagaimana didefinisikan dalam legislasi utama:

(a) produksi, manufaktur, dan pengolahan; (b) distribusi, penjualan, atau suplai; (c) pembelian untuk tujuan dalam butir (a) atau (b), tetapi bukan pembelian sebagai konsumen. Kayu dan produk kayu tidak masuk dalam lingkup peraturan uji tuntas karena diatur dalam Peraturan Kayu UK.

- daging sapi
- kakao
- kopi
- kulit
- jagung
- minyak sawit
- karet
- kedelai
- tidak ada satu pun dari pilihan di atas

Pertanyaan ke-20. Cantumkan komoditas pertanian lain yang terkait dengan konversi hutan yang Anda gunakan dalam kegiatan komersial Anda di UK.

Untuk tujuan pertanyaan ini, 'kegiatan komersial' sebagaimana didefinisikan dalam legislasi utama:

(a) produksi, manufaktur, dan pengolahan; (b) distribusi, penjualan, atau suplai; (c) pembelian untuk tujuan dalam butir (a) atau (b), tetapi bukan pembelian sebagai konsumen.

## Melaksanakan persyaratan uji tuntas

26. Secara global, riset belakangan ini memperkirakan bahwa setidaknya 69% dari deforestasi tropis untuk pertanian komersial antara tahun 2013 dan 2019 dilakukan dengan melanggar hukum nasional.<sup>2</sup> Hutan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia dan bumi, termasuk dengan mengatur siklus air, mencegah erosi tanah, menyerap karbon, dan menjadi habitat untuk sekitar

---

<sup>2</sup> Tren Hutan, 2021: [Penebangan Ilegal, Barang Ilegal](#).

80% dari keanekaragaman hayati di dunia di atas tanah.<sup>3</sup> Pemerintah UK berkomitmen kuat untuk mengatasi dua tantangan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan mengurangi deforestasi ilegal yang terkait dengan pertanian berperan penting dalam kedua tantangan tersebut.

27. Jawaban dalam konsultasi publik kami pada tahun 2020 menyoroti kebutuhan untuk melakukan tindakan segera untuk mengatasi deforestasi global. Oleh karena itu, kami bermaksud menyusun peraturan pelaksanaan awal sesegera mungkin untuk mencatat beberapa pendorong deforestasi paling signifikan, setelah mempertimbangkan jawaban dalam konsultasi kedua ini.
28. Setelah peraturan pelaksanaan diberlakukan, perusahaan (baik yang berada dalam lingkup atau sebagai pemasok atau penyedia jasa kepada perusahaan dalam lingkup) akan memiliki waktu untuk bersiap mematuhi peraturan sebelum awal periode pelaporan pertama saat perusahaan yang diatur harus mematuhi persyaratan uji tuntas.
29. Periode ini harus memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan sistem uji tuntas dan pelaporan. Contohnya, periode ini harus memungkinkan perusahaan untuk mulai bekerja dengan pemasok yang ada untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mencari pemasok baru, atau melakukan diversifikasi usaha.
30. Kami mengonsultasikan hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan berapa lama waktu persiapan dibutuhkan perusahaan untuk mematuhi peraturan tetapi mengusulkan periode minimum 6 bulan. Kami tertarik dengan pendapat tentang hal ini dari semua perusahaan yang terkait, apakah perusahaan dalam lingkup atau pemasok atau penyedia jasa kepada perusahaan dalam lingkup.
31. Kami merencanakan langkah-langkah peningkatan kesadaran tentang ketentuan ini di antara perusahaan-perusahaan yang terkait, para pemangku kepentingan lain, dan anggota masyarakat sebelum dimulainya periode pelaporan awal berdasarkan peraturan, termasuk melalui publikasi panduan.

Pertanyaan ke-21. Apakah kami harus menyusun peraturan pelaksanaan sesegera mungkin? Jika Anda mencentang tidak, sebutkan alasannya.

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-22. Apa yang harus dipertimbangkan saat mempertimbangkan berapa lama waktu persiapan yang dibutuhkan perusahaan sebelum peraturan diberlakukan?

---

<sup>3</sup> Aerts R, dan Honnay O, 2011: Pemulihan hutan, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem

## Komoditas hutan berisiko

32. Ketentuan UU Lingkungan memiliki kewenangan yang memungkinkan Sekretaris Negara untuk menetapkan komoditas hutan berisiko yang akan diterapkan dalam peraturan melalui peraturan pelaksanaan.
33. Ketentuan ini mendefinisikan 'komoditas hutan berisiko' sebagai komoditas yang telah diproduksi dari tumbuhan, hewan, atau organisme hidup lainnya dan untuk produksinya, Sekretaris Negara menganggap hutan sedang atau dapat dikonversi untuk pertanian.
34. Ketentuan UU Lingkungan mendefinisikan 'hutan' sebagai area lahan lebih dari 0,5 hektar dengan tutupan pohon setidaknya 10% (tidak termasuk pohon yang ditanam untuk memproduksi kayu atau komoditas lain). Ini sesuai dengan definisi hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan mencakup tanah yang seluruhnya atau sebagian terbenam di dalam air (baik sementara maupun permanen).
35. Saat mempertimbangkan apakah sebuah komoditas memang atau dapat mendorong deforestasi untuk tujuan produksinya, dan oleh karena itu, apakah komoditas tersebut dapat diatur dalam ketentuan ini, Sekretaris Negara harus menggunakan definisi hutan ini. Namun, setelah komoditas tertentu dimasukkan dalam peraturan, persyaratan uji tuntas akan berlaku pada semua usaha yang diatur yang menggunakan komoditas tertentu itu atau produk-produk turunannya terlepas dari tempat ditumbuhkannya, apakah di area hutan atau ekosistem lain (contohnya, sabana).
36. Peraturan Kayu UK sudah melarang penempatan kayu dan produk kayu yang ditebang secara ilegal di pasar UK. Untuk menghindari tumpang tindih dengan skema ini, produk-produk ini tidak berada dalam lingkup persyaratan utama tentang uji tuntas untuk komoditas hutan berisiko.
37. Di bagian ini, pertama kami mencari bukti untuk menguji komoditas mana yang merupakan pendorong utama deforestasi dan oleh karena itu, berada dalam lingkup ketentuan UU Lingkungan. Kedua, kami mencari bukti dan pendapat untuk menentukan urutan penempatan komoditas hutan berisiko utama di dalam peraturan. Ketiga, kami berupaya memperoleh pendapat tentang jumlah komoditas yang harus kami atur dalam putaran pertama peraturan pelaksanaan.

## Mengidentifikasi komoditas utama dalam lingkup

38. Menggunakan peraturan pelaksanaan untuk memasukkan komoditas ke dalam lingkup peraturan memungkinkan kami untuk melakukan pendekatan bertahap pada peraturan. Ini memberikan fleksibilitas untuk memprioritaskan komoditas yang terkait dengan risiko deforestasi tertinggi, sekaligus memelihara peluang untuk menambah rentang komoditas yang ditangkap melalui peraturan pelaksanaan. Ini memungkinkan kami mengakomodasi pola deforestasi yang berubah-ubah untuk mencatat komoditas yang dapat menjadi pendorong deforestasi utama di kemudian hari.

39. Bukti ilmiah menyoroti peran bahwa sejumlah besar komoditas telah dan terus berperan dalam mendorong deforestasi dan konversi habitat. Namun, evaluasi sumber-sumber utama mengidentifikasi konsensus luas tentang tujuh komoditas pertanian yang bertanggung jawab di antara sumber-sumber utama tersebut karena telah mendorong mayoritas deforestasi global yang belakangan ini dan sedang terjadi<sup>4,5,6,7,8</sup>. Komoditas tersebut adalah ternak (daging sapi dan kulit sapi), kakao, kopi, jagung, minyak sawit, karet, dan kedelai.
40. Berdasarkan bukti bahwa ketujuh komoditas ini bertanggung jawab juga atas sekitar 65% dari risiko deforestasi tropis tahunan yang terkait dengan rantai pasok UK<sup>8</sup>, kami mengusulkan agar ketujuh komoditas ini dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam peraturan uji tuntas.
41. Kami akan mempertimbangkan bukti lebih lanjut yang didapatkan terkait dengan komoditas yang mendorong deforestasi (tropis dan nontropis) untuk menguji komoditas mana yang dianggap masuk dalam lingkup sebelum menerapkan peraturan.

Pertanyaan ke-23. Apakah Anda dapat memberikan bukti lebih lanjut tentang komoditas yang mendorong deforestasi? Berikan detailnya di sini.

## Rangkaian legislasi

42. Jika kami melanjutkan ketujuh komoditas hutan berisiko utama di atas, kami tidak bermaksud untuk memasukkan semuanya ke dalam peraturan sekaligus. Kami berencana menerapkan pendekatan bertahap sehingga kami dapat bergerak lebih cepat dengan peraturan untuk mencatat pendorong deforestasi paling signifikan dan memperoleh pelajaran sebelum memperluas lingkup ke lebih banyak komoditas.
43. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini untuk menentukan urutan dalam legislasi untuk pencantuman komoditas hutan berisiko utama yang diidentifikasi:
  - Dampak komoditas ini pada deforestasi global, dengan melihat misalnya perkiraan luas hutan dalam hektar yang dikonversi setiap tahun untuk produksi pertanian komoditas tersebut di seluruh dunia
  - Peran UK dalam deforestasi global ini melalui konsumsi komoditas utama kita
  - Kemampuan untuk menghasilkan peraturan yang efektif, yang mencakup pertimbangan tentang bagaimana persyaratan dan proses uji tuntas dapat memberikan bantuan terbaik untuk mengatasi deforestasi ilegal dengan disesuaikan dengan rantai pasok komoditas tertentu. Ini dapat juga mencakup pertimbangan konteks komoditas yang lebih luas, misalnya kesiapan sebuah sektor untuk peraturan.

---

<sup>4</sup> JNCC, 2021: [Menuju ke indikator-indikator dampak lingkungan global dari konsumsi UK](#)

<sup>5</sup> Komisi Eropa, 2013: [Dampak konsumsi UE pada deforestasi](#)

<sup>6</sup> World Resources Institute, 2020: [Memperkirakan peran tujuh komoditas dalam deforestasi yang terkait dengan pertanian](#)

<sup>7</sup> WWF, 2020: [Bisnis yang lebih berisiko: Jejak UK pada tanah di luar negeri](#)

<sup>8</sup> JNCC, 2021: [Menuju ke indikator-indikator dampak lingkungan global dari konsumsi UK](#)

Pertanyaan ke-24. Faktor-faktor mana dari berikut ini yang menurut Anda harus dipertimbangkan untuk menentukan rangkaian legislasi? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- dampak komoditas pada deforestasi global
- peran UK dalam deforestasi global ini
- kemampuan menghasilkan peraturan yang efektif
- lainnya (sebutkan)

Pertanyaan ke-25. Sumber data atau informasi apa saja yang harus digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang diusulkan?

Pertanyaan ke-26. Apakah Anda memiliki komentar lebih lanjut tentang urutan yang kami buat untuk memasukkan komoditas hutan berisiko utama?

## Putaran pertama peraturan pelaksanaan

44. Setelah kami menentukan urutan yang kami buat untuk memasukkan komoditas-komoditas utama, kami harus memutuskan berapa banyak komoditas yang ditargetkan masuk dalam peraturan pelaksanaan bagian pertama.
45. Ada beberapa pertimbangan utama dalam memutuskan jumlah komoditas yang diatur dalam bagian pertama:

### 1. Kecepatan pelaksanaan

Semakin sedikit komoditas yang dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan bagian pertama, maka semakin cepat perusahaan dapat memiliki sistem uji tuntas dan semakin cepat pula persyaratannya dapat mulai berlaku.

Alasannya adalah karena persyaratannya dapat disesuaikan dengan rantai pasok setiap komoditas yang diatur agar berlaku dan karena perusahaan mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk menyesuaikan sistem uji tuntas dengan setiap komoditas yang diatur. Memasukkan lebih sedikit komoditas juga akan memungkinkan pengembangan lebih cepat untuk infrastruktur penegakan yang kuat karena pengembangan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk rangkaian komoditas yang lebih luas daripada rangkaian komoditas yang lebih sempit. Tanpa waktu yang memadai untuk membuat rancangan yang spesifik untuk komoditas dan menetapkan skema penegakan yang efektif, ketentuannya mungkin tidak akan mencapai dampak yang dimaksudkan.

### 2. Kemampuan untuk mengambil pelajaran

Dengan memasukkan komoditas dalam beberapa putaran, proses pemasukan komoditas dan pengembangan putaran-putaran peraturan pelaksanaan berikutnya dapat diinformasikan dengan bukti dan pengalaman dari putaran sebelumnya.

### 3. Kekuatan bukti atas dampak relatif dari berbagai komoditas pada deforestasi

Jika komoditas memiliki perbedaan pada dampak yang terjadi pada deforestasi, ada argumen lebih kuat untuk terlebih dahulu mengatasi komoditas yang berdampak lebih besar.

### 4. Dampak keseluruhan dalam 5 tahun pertama

Semakin banyak komoditas hutan berisiko yang dimasukkan dalam ketentuan, semakin besar dampak legislasi pada deforestasi ilegal yang terkait dengan rantai pasok UK.

Di satu sisi, mengatur sebagian besar atau ketujuh komoditas utama dalam putaran pertama hanya dapat berlaku dalam sekitar 4 sampai 5 tahun, tetapi akan berdampak paling signifikan pada deforestasi ilegal.

Di sisi lain, mengatur lebih sedikit komoditas dengan lebih awal akan mengatasi lebih sedikit deforestasi ilegal yang terkait dengan rantai pasok UK dalam jangka pendek. Memungkinkan juga bahwa dengan memasukkan komoditas utama melalui berbagai putaran peraturan pelaksanaan, kami masih dapat mengatur ketujuh komoditas pada titik yang sama seolah-olah kami mengatasi sebagian besar atau semuanya secara bersamaan dalam satu putaran awal peraturan pelaksanaan.

46. Kami telah mengidentifikasi tiga opsi untuk putaran pertama peraturan pelaksanaan:

**Opsi ke-1: memasukkan 2 komoditas dalam putaran pertama peraturan pelaksanaan** Para pejabat memperkirakan ini akan membutuhkan waktu 18 sampai 24 bulan untuk mulai berlaku, termasuk periode minimum selama 6 bulan bagi perusahaan-perusahaan untuk bersiap untuk peraturan.<sup>9</sup> Pada saat itu, kami akan terus mengupayakan cara agar komoditas lain dapat dimasukkan dalam putaran berikutnya, dan Langkah ini dapat mengikuti dengan cepat.

**Opsi ke-2: memasukkan 3 sampai 4 komoditas dalam putaran pertama peraturan pelaksanaan** Para pejabat terkait memperkirakan ini akan membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun untuk mulai berlaku, termasuk periode minimum selama enam bulan bagi perusahaan-perusahaan untuk bersiap untuk peraturan. Sama seperti Opsi ke-1, kami akan terus menjajaki cara memasukkan komoditas lain dalam putaran berikut.

**Opsi ke-3: memasukkan 5 sampai 7 komoditas dalam putaran pertama legislasi turunan** Para pejabat terkait memperkirakan ini akan membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun untuk mulai berlaku, termasuk periode minimum selama enam bulan bagi perusahaan-perusahaan untuk bersiap untuk peraturan. Kami akan dapat mulai bekerja untuk menilai komoditas hutan berisiko lainnya untuk

---

<sup>9</sup> Setelah peraturan pelaksanaan diberlakukan, perusahaan-perusahaan dalam lingkup akan memiliki waktu untuk bersiap sebelum ketentuannya berlaku. Durasi waktu persiapan tergantung pada konsultasi, tetapi kami mengusulkan setidaknya 6 bulan.



dimasukkan ke dalam lingkup, termasuk komoditas yang berpotensi menjadi pendorong utama deforestasi dalam lima tahun mendatang.

Pertanyaan ke-27. Opsi mana yang Anda rekomendasikan untuk peraturan pelaksanaan putaran pertama ? Sebutkan alasan Anda.

- opsi 1
- opsi 2
- opsi 3

## Perusahaan-perusahaan dalam lingkup

47. Ketentuan UU Lingkungan dibuat untuk dapat memberi dampak terbesar untuk mengatasi deforestasi ilegal, dan pada saat yang sama tidak memberikan beban yang berlebihan atau tidak proporsional pada perusahaan. Dengan demikian, ketentuan akan berfokus pada perusahaan-perusahaan besar yang berdampak lebih besar pada rantai pasok komoditas hutan berisiko, sekaligus meminimalkan beban peraturan pada perusahaan-perusahaan kecil.
48. Kerangka dalam legislasi utama menetapkan bahwa agar dapat masuk ke dalam lingkup ketentuan, sebuah perusahaan harus:
  - melampaui ambang batas omzet yang ditetapkan, atau memiliki perusahaan induk yang melampaui ambang batas omzet yang ditetapkan, dan
  - menggunakan komoditas hutan berisiko yang diatur dalam kegiatan komersial mereka di UK
49. Peraturan pelaksanaan akan menetapkan definisi 'omzet' serta ambang batas, dan perusahaan yang melampaui ambang batas tersebut akan masuk ke dalam lingkup.
50. Kami bermaksud untuk menggunakan panduan pendamping untuk membantu perusahaan-perusahaan mengetahui apakah mereka dapat termasuk dalam lingkup ketentuan. Contohnya, definisi kegiatan komersial ditetapkan dalam legislasi utama, sehingga kami bermaksud untuk memberikan daftar contoh kegiatan yang tercakup dalam panduan.

## Definisi omzet

51. Kami bermaksud bahwa definisi 'omzet' sama dengan definisinya dalam UU Perusahaan 2006 (Pasal 474)<sup>10</sup>. Ini sesuai dengan legislasi lain dan definisi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk laporan pembukuan keuangan mereka.
52. Kami mengusulkan agar perusahaan-perusahaan harus berada dalam lingkup ketentuan jika mereka melampaui ambang batas omzet dalam tahun buku sebelumnya. Kami yakin ini adalah cara paling sederhana dan paling efektif yang

---

<sup>10</sup> Definisi dalam UU Perusahaan: 'omzet' terkait dengan perusahaan, adalah jumlah yang diperoleh dari penyediaan barang dan jasa, setelah dikurangi – (a) diskon harga, (b) pajak pertambahan nilai, dan (c) pajak-pajak lainnya berdasarkan jumlah yang diperoleh tersebut.

memungkinkan perusahaan (dan otoritas regulator) untuk mengetahui siapa yang masuk dalam lingkup ketentuan. Ini juga sejalan dengan pendekatan yang diambil dalam syarat pelaporan dalam UU Perbudakan Modern – di mana pelaporan tersebut harus memenuhi kriteria lingkup dalam tahun buku sebelumnya.

Pertanyaan ke-28. Apakah perusahaan harus berada dalam lingkup ketentuan jika mereka melampaui ambang batas omzet dalam tahun buku sebelumnya?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

## **Mengatur perusahaan-perusahaan yang berbasis di UK dan beroperasi di UK**

53. Legislasi utama menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam lingkup adalah perusahaan yang menggunakan komoditas hutan berisiko dalam kegiatan komersial mereka di UK. Perusahaan dalam lingkup termasuk perusahaan yang berbasis di UK dan perusahaan yang tidak berbasis di UK (perusahaan yang kantor pusatnya tidak berada di UK, tetapi melakukan kegiatan komersial di UK).
54. Saat menetapkan ambang batas omzet, kami mengusulkan untuk menggunakan 'omzet UK' sebagai metrik ukuran untuk mengatur perusahaan di UK. Ini berarti bahwa agar perusahaan-perusahaan yang berbasis di UK masuk ke dalam lingkup ketentuan, omzet tahunannya di UK akan melampaui ambang batas omzet yang ditetapkan dalam mata uang pound sterling.
55. Pendekatan alternatifnya adalah menggunakan omzet global perusahaan.

Pertanyaan ke-29. Apakah kami harus menggunakan omzet UK sebagai metrik ukuran untuk mencatat perusahaan yang berbasis di UK?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

## **Mengatur perusahaan-perusahaan yang tidak berbasis di UK tetapi beroperasi di UK**

56. Akan ada kasus di mana perusahaan-perusahaan besar dalam rantai pasok komoditas tidak memiliki kantor pusat di UK, tetapi tetap melakukan kegiatan komersial di UK. Contohnya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi di UK melalui anak perusahaan (perusahaan yang dimiliki atau dikendalikannya) yang merupakan usaha kecil atau menengah yang terdaftar di UK. Atau, perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi di UK dan tidak terikat dengan usaha apa pun yang terdaftar di UK.

57. Kami ingin memastikan bahwa jika perusahaan besar yang tidak berbasis di UK tetapi beroperasi di UK, pengoperasian tersebut tunduk juga pada ketentuan uji tuntas. Namun, kami mengakui ada berbagai tantangan saat mencatat perusahaan-perusahaan ini dengan efektif karena mereka mungkin tidak terdaftar di UK atau mungkin tidak beroperasi melalui anak perusahaan yang terdaftar di UK.
58. Oleh karena itu, ada keterbatasan data untuk mengetahui perusahaan mana yang akan masuk ke dalam lingkup - perusahaan ini mungkin tidak memiliki omzet UK, sehingga tidak dapat diidentifikasi masuk ke dalam lingkup dengan cara yang sama dengan perusahaan yang berkantor pusat di UK.
59. Kami mempertimbangkan dua rute potensial untuk peraturan perusahaan yang tidak berbasis di UK tetapi melakukan kegiatan komersial di UK:

#### **Opsi ke-1: omzet yang terkait dengan kegiatan di UK**

Perusahaan yang tidak berbasis di UK akan masuk ke dalam lingkup jika melampaui ambang batas yang terkait hanya dengan kegiatan komersial mereka di UK dan bukan menurut skala pengoperasian global mereka.

Dengan demikian, ambang batas ini akan ditetapkan dengan menggunakan metrik omzet yang serupa dengan omzet perusahaan yang berbasis di UK, sekaligus mengakomodasi fakta bahwa perusahaan yang tidak berbasis di UK tidak dapat memiliki omzet UK sebagaimana dilaporkan oleh perusahaan yang berkantor pusat di UK.

#### **Opsi ke-2: omzet global**

Perusahaan yang tidak berbasis di UK akan masuk ke dalam lingkup jika melampaui ambang batas yang terkait dengan pengoperasian global mereka secara keseluruhan, berbeda dengan omzet yang dihasilkan dari kegiatan mereka di UK.

Contohnya, perusahaan yang tidak berbasis di UK tetapi beroperasi di UK dan beberapa negara lain akan masuk ke dalam lingkup jika omzet mereka di semua negara tempat mereka beroperasi melampaui ambang batas yang ditetapkan.

60. Untuk kedua opsi tersebut, tingkat ambang batas untuk masuk ke dalam lingkup untuk perusahaan yang tidak berbasis di UK bisa sama dengan ambang batas omzet di UK untuk perusahaan yang berbasis di UK, atau berbeda.
61. Setelah menetapkan cara efektif untuk mencatat perusahaan yang tidak berbasis di UK, kami akan melakukan riset lebih lanjut untuk mengetahui apakah tingkat ambang batas omzet harus berbeda dengan yang ditetapkan untuk perusahaan yang berbasis di UK atau tidak, dan jika demikian, bagaimana caranya.

Pertanyaan ke-30. Metrik ukuran mana berikut ini yang harus digunakan untuk mengatur pengoperasian perusahaan UK yang berbasis di luar UK berdasarkan legislasi uji tuntas? Sebutkan alasan Anda.

Untuk tujuan pertanyaan ini, kami bertanya tentang perusahaan yang tidak berkantor pusat di UK, tetapi memiliki kegiatan komersial di UK. Ini bisa tanpa perusahaan yang terdaftar di UK, atau melalui usaha kecil atau menengah yang terdaftar di UK.

- opsi ke-1: omzet yang terkait dengan kegiatan di UK
- opsi ke-2: omzet global
- lainnya (sebutkan)

Pertanyaan ke-31. Apakah Anda dapat memberikan data atau informasi yang akan membantu mengidentifikasi perusahaan potensial dalam lingkup yang berbasis di luar UK? Berikan detailnya untuk jawaban Anda.

## Tingkat ambang batas omzet

62. Untuk menentukan tingkat ambang batas omzet untuk setiap area komoditas, penting untuk mempertimbangkan sejumlah faktor. Kami mengusulkan bahwa faktor-faktor berikut ini relevan:

- dampak kebijakan, contohnya perusahaan mana yang akan paling memengaruhi rantai pasok komoditas untuk UK dan menjadi katalis bagi perubahan menuju praktik yang lebih transparan dan akuntabel
- beban pada perusahaan, contohnya dampak pada perusahaan yang melakukan uji tuntas
- keberhasilan, contohnya berapa jumlah perusahaan yang akan masuk ke dalam lingkup dan seberapa mudah mengidentifikasinya untuk mendukung peraturan dan penegakan yang efektif.

Pertanyaan ke-32. Faktor-faktor mana berikut ini yang harus dipertimbangkan saat menetapkan tingkat ambang batas omzet? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- dampak kebijakan
- beban pada perusahaan
- keberhasilan
- lainnya (sebutkan)

63. Setiap rantai pasok komoditas berbeda, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai-rantai pasok ini memiliki ukuran beragam. Contohnya, perusahaan yang menggunakan Komoditas A dalam jumlah sangat banyak biasanya dapat memiliki omzet yang 'sangat tinggi', tetapi perusahaan yang menggunakan Komoditas B dalam jumlah sangat banyak biasanya dapat memiliki omzet yang 'cukup tinggi'.

64. Dengan demikian, kami dapat menentukan ambang batas omzet menurut komoditas. Ini akan membantu memastikan kami dapat mengatur perusahaan-perusahaan yang memiliki pengaruh paling besar pada rantai pasok UK dan dapat

- mengirimkan sinyal positif kepada produsen, sekaligus meminimalkan beban peraturan pada perusahaan yang memiliki dampak lebih kecil pada rantai pasok.
65. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami telah melakukan analisis sementara tentang omzet perusahaan yang beroperasi di setiap rantai pasok komoditas utama, serta keterlibatan pemangku kepentingan awal dalam hal penetapan ambang batas untuk masuk ke dalam lingkup.
  66. Karena kami ingin menyusun langkah-langkah yang proporsional dan memaksimalkan dampak sekaligus meminimalkan beban pada perusahaan, kami mencari pendapat tentang berbagai opsi, antara £50 dan £200 juta.
  67. Detail lebih lanjut tentang analisis ini, termasuk data jumlah perusahaan di atas setiap opsi ambang batas omzet, dapat dilihat di penilaian dampak konsultasi, yang telah dipublikasikan beserta dengan dokumen konsultasi ini.
  68. Setelah konsultasi ini, kami akan mempertimbangkan pendapat dan melakukan riset dan interaksi lebih lanjut untuk menentukan ambang batas persis untuk setiap komoditas hutan berisiko yang dibawa ke dalam lingkup peraturan.

**Pertanyaan ke-33.** Untuk setiap komoditas berikut ini, centang di mana ambang batas omzet untuk memasukkan perusahaan-perusahaan berbasis UK harus ditetapkan.

Untuk tujuan pertanyaan ini, kami mencari pendapat tentang daging sapi (termasuk produk susu dan produk turunan lainnya) dan kulit secara terpisah, berbeda dengan 'sapi'. Meskipun keduanya terkait dengan sapi, produk dan perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasok ini berbeda, sehingga kami ingin mengumpulkan pendapat tentang keduanya. Data lebih lanjut tentang jumlah perusahaan yang tertangkap oleh setiap ambang batas omzet tersedia dalam penilaian dampak konsultasi.

Daging sapi:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Kokoa:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Kopi:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Kulit:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Jagung:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Minyak sawit:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Karet:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Kedelai:

- £50 juta
- £100 juta
- £200 juta
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-34. Apakah Anda memiliki komentar lebih lanjut tentang perusahaan-perusahaan dalam lingkup ?

## Pengecualian

69. Setelah masukan dari konsultasi publik tahun lalu, kami menerapkan persyaratan di mana perusahaan-perusahaan yang masuk dalam lingkup legislasi uji tuntas dapat mengajukan pemberitahuan untuk dikecualikan dari ketentuan jika jumlah komoditas yang mereka gunakan dalam kegiatan komersial mereka di UK dalam suatu tahun tertentu berada di bawah ambang batas pengecualian. Ini memastikan kami tidak membebani perusahaan-perusahaan yang mungkin berukuran besar tetapi menggunakan jumlah komoditas yang sedikit dalam rantai pasok mereka.

70. Detail yang terkait dengan pengecualian akan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan – termasuk tingkat penetapan ambang batas.
71. Pendekatan kami harus memungkinkan identifikasi dan pengecualian dari persyaratan tentang perusahaan-perusahaan yang menggunakan volume komoditas yang rendah dan memberikan cara paling sederhana bagi perusahaan untuk mengetahui apakah mereka dikecualikan dari ketentuan.

## Ambang batas pengecualian

72. Komoditas hutan berisiko ditemukan dalam banyak bentuk dan produk yang berbeda di seluruh rantai pasok, dan perusahaan-perusahaan menggunakannya dalam berbagai cara. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan menggunakan komoditas hutan berisiko dalam bentuk mentah dan belum diolah. Dalam kasus lain, perusahaan-perusahaan menggunakan komoditas hutan berisiko yang tertanam di dalam produk lain, yang kami sebut 'produk turunan'. Contohnya adalah produk dari ternak yang diberi pakan komoditas seperti kedelai atau jagung, atau produk seperti sabun yang mengandung komoditas seperti minyak sawit dalam bahan-bahannya.
73. Kami mengusulkan untuk menetapkan satu ambang batas pengecualian untuk setiap komoditas hutan berisiko yang diatur yang akan menggabungkan jumlah komoditas mentah yang digunakan dengan jumlah produk yang merupakan turunan dari komoditas ke dalam total kumulatif di seluruh kegiatan komersial perusahaan di UK. Ini memberikan cara termudah bagi perusahaan-perusahaan untuk menghitung apakah mereka memenuhi ambang batas pengecualian atau tidak, sambil memastikan kebijakan ini berlaku pada perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak terbesar pada rantai pasok UK.
74. Untuk menentukan apakah sebuah perusahaan dikecualikan atau tidak, perusahaan itu akan menjumlahkan volume komoditas mentah dan yang ditanamkan yang digunakan dalam kegiatan komersial mereka di UK. Jika volume total berada di bawah ambang batas pengecualian, perusahaan itu dapat memberi tahu otoritas regulator bahwa mereka dikecualikan.

Pertanyaan ke-35. Apakah kami harus menetapkan satu ambang batas pengecualian untuk setiap komoditas hutan berisiko yang diatur, dengan menggabungkan penggunaan komoditas mentah dengan penggunaan komoditas turunan?

- Ya
- Tidak

## Menghitung volume komoditas yang digunakan

75. Agar perusahaan mengetahui apakah mereka dapat dikecualikan dari persyaratan uji tuntas, mereka harus mengetahui berapa banyak setiap komoditas digunakan dalam kegiatan komersial mereka di UK.
76. Dengan mempertimbangkan kompleksitas rantai pasok dan produk komoditas hutan berisiko, banyak perusahaan tidak mengetahui volume persis dari setiap komoditas yang masuk ke dalam produk atau barang yang mereka gunakan.



Contohnya, ini dapat berupa volume kedelai yang tertanam dalam produk susu karena penggunaan pakan ternak berbasis kedelai, atau kuantitas minyak sawit dalam produk pembersih.

77. Untuk mengatasi kesenjangan ini, faktor-faktor konversi telah dibuat untuk membantu perusahaan menghitung volume komoditas yang mereka gunakan dalam rantai pasok mereka. Dengan mengambil contoh produk susu di mana sapi diberi pakan kedelai, jika sebuah perusahaan membeli susu dengan berat ton tertentu, faktor-faktor konversi dapat memperkirakan volume kedelai yang terdapat dalam susu tersebut.
78. Faktor-faktor konversi memiliki margin kesalahan yang berarti bahwa dalam kasus tertentu, faktor-faktor tersebut dapat membuat perkiraan yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk total volume komoditas yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Namun, faktor-faktor ini dapat memberi dasar bagi perusahaan untuk mengidentifikasi di mana komoditas mungkin tertanam dalam rantai pasok mereka, dan volumenya. Margin kesalahan ini dapat menurun juga ketika faktor-faktor konversi menjadi lebih disesuaikan dengan rantai pasok UK dan cara produksi seiring berjalannya waktu.
79. Kami mengusulkan agar perusahaan-perusahaan harus dapat menggunakan faktor-faktor konversi untuk membantu mengetahui apakah mereka dapat dikecualikan dari persyaratan uji tuntas.

Pertanyaan ke-36. Apakah perusahaan harus dapat menggunakan faktor-faktor konversi untuk memperkirakan volume komoditas yang digunakan dalam rantai pasok untuk mengetahui apakah mereka dapat dikecualikan dari persyaratan uji tuntas? Sebutkan alasan Anda.

- Ya
- Tidak

80. Kami mengusulkan untuk memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih cara mereka menghitung volume setiap komoditas yang diatur yang mereka gunakan untuk tujuan pengecualian. Perusahaan-perusahaan akan dapat memilih apakah akan menggunakan faktor-faktor konversi, yang contoh-contohnya dapat kami rekomendasikan dalam panduan; data yang dapat diverifikasi dari rantai pasok mereka; atau metodologi lain.
81. Pendekatan ini sama dengan yang digunakan dalam ketentuan Pelaporan Energi dan Karbon yang Disederhanakan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan-perusahaan untuk memilih cara yang paling tidak memberatkan dan/atau paling representatif dari rantai pasoknya. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas untuk memperbarui panduan dengan informasi tentang metodologi, termasuk faktor-faktor konversi paling kuat, karena terus dikembangkan dan disesuaikan lebih lanjut dengan rantai pasok UK.
82. Pendekatan ini membawa tingkat risiko dengan memberikan lingkup kepada perusahaan-perusahaan untuk menggunakan faktor atau metodologi konversi yang mungkin lebih lemah daripada yang direkomendasikan dalam panduan. Ini dapat menimbulkan perkiraan lebih rendah untuk penggunaan komoditas. Untuk



mengatasi hal ini, kami mengusulkan untuk menetapkan dalam peraturan pelaksanaan bahwa metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah mereka dapat dikecualikan harus 'wajar'. Kami juga akan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dalam pemberitahuan pengecualian mereka tentang metodologi yang telah mereka gunakan sehingga penilaian metodologinya dapat dilakukan.

83. Jika perusahaan mengajukan pemberitahuan pengecualian dan otoritas penegakan menganggap metodolog yang digunakan tidak wajar, otoritas penegakan dapat melakukan tindakan.

Pertanyaan ke-37. Apakah kami harus menggunakan pendekatan yang diusulkan agar perusahaan-perusahaan mengerti apakah mereka dapat dikecualikan? Sebutkan alasan Anda.

Pendekatan yang diusulkan adalah memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih metodologi mana yang mereka gunakan untuk menghitung volume, memberikan informasi tentang metodologi yang direkomendasikan dalam panduan, dan mewajibkan dalam peraturan pelaksanaan bahwa metodologi yang digunakan harus wajar.

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

## Tingkat ambang batas pengecualian

84. Sama halnya dengan ambang batas omzet, untuk menentukan di mana ambang batas pengecualian harus ditetapkan, sejumlah faktor harus dipertimbangkan.
85. Kami mengusulkan agar faktor-faktor berikut ini relevan untuk menilai opsi-opsi ambang batas pengecualian:
- dampak kebijakan, contohnya perusahaan-perusahaan mana yang akan paling memengaruhi rantai pasok komoditas dan menjadi katalis bagi perubahan menuju praktik yang lebih transparan dan akuntabel
  - beban pada perusahaan, contohnya apa dampaknya pada perusahaan
  - keberhasilan, contohnya jumlah perusahaan dalam lingkup dan menilai metodologi untuk mendukung peraturan dan penegakan yang efektif.

Pertanyaan ke-38. Faktor-faktor mana berikut ini yang harus dipertimbangkan saat menetapkan tingkat ambang batas pengecualian? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- dampak kebijakan
- beban pada perusahaan
- keberhasilan
- lainnya (sebutkan)

86. Kami juga mampu menetapkan tingkat ambang batas pengecualian atas dasar satu per satu komoditas . Ini mencerminkan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam setiap rantai pasok komoditas juga berbeda menurut jumlah setiap komoditas yang mereka gunakan.
87. Ada keterbatasan data dalam hal memahami atau menghitung perincian volume komoditas yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok mereka. Oleh karena itu, melalui konsultasi ini, kami sedang mengumpulkan bukti untuk memahami di skala mana (contohnya, 10-an, 100-an, 1000-an ton) ambang batas pengecualian harus ditetapkan. Ini akan membantu kami memastikan bahwa kami mengatur perusahaan-perusahaan yang menggunakan volume komoditas yang signifikan dan mengizinkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan volume yang jauh lebih kecil untuk dikecualikan.
88. Kami juga sedang mengumpulkan bukti melalui konsultasi ini untuk memahami volume komoditas hutan berisiko yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun basis bukti kami. Setelah konsultasi, ini akan memberi masukan untuk riset dan pengujian lebih lanjut untuk memahami di mana persisnya ambang batas harus ditetapkan untuk setiap komoditas yang kami bawa ke dalam lingkup.

Pertanyaan ke-39. Untuk setiap komoditas berikut ini, centang di mana skala tingkat ambang batas pengecualian harus ditetapkan.

Untuk tujuan pertanyaan ini, kami mencari pendapat tentang daging sapi dan kulit secara terpisah, berbeda dengan 'sapi'. Meskipun keduanya terkait dengan sapi, rantai pasoknya berbeda, sehingga kami ingin mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang keduanya. Anda tidak harus menjawab pertanyaan ini untuk setiap atau semua komoditas yang terdaftar jika Anda tidak memiliki pendapat atau informasi yang relevan.

1 ton sama dengan 1000 kilogram Daging Sapi:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Kokoa:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Kopi:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Kulit:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Jagung:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Minyak sawit:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Karet:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Kedelai:

- 1 ton
- 10 ton
- 100 ton
- 1000 ton
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-40. Berikan alasan untuk skala yang dipilih untuk setiap komoditas dalam Pertanyaan ke-39.

Pertanyaan ke-41. Apakah Anda memiliki komentar lebih lanjut tentang pengecualian?

## Pertanyaan tambahan untuk responden perusahaan

Catatan: 3 pertanyaan berikut ini hanya untuk responden perusahaan

89. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kami ingin mengumpulkan pendapat dan informasi dari perusahaan-perusahaan tentang volume komoditas yang digunakan dalam rantai pasok, dan metodologi yang digunakan untuk membantu menghitung volume komoditas ini.

Pertanyaan ke-42. Apakah Anda tahu volume persis atau perkiraan volume komoditas hutan berisiko yang Anda gunakan dalam kegiatan komersial Anda di UK dalam tahun tertentu?

Jika Anda tidak tahu volume komoditas hutan berisiko yang Anda gunakan dalam kegiatan komersial Anda di UK dalam tahun tertentu, tulis 'tidak tahu'.

- volume persis
- volume perkiraan
- tidak tahu

Pertanyaan ke-43. Berapa volume setiap komoditas hutan berisiko yang Anda gunakan dalam kegiatan komersial Anda di UK dalam tahun tertentu?

Jika Anda mengetahuinya, berikan volume persis atau perkiraan dengan mencantumkan unit. Untuk komoditas hutan berisiko yang volume penggunaannya tidak Anda ketahui, tulis 'tidak tahu'.

- daging sapi (sebutkan volume, tidak tahu)
- kakao (sebutkan volume, tidak tahu)
- kopi (sebutkan volume, tidak tahu)
- kulit (sebutkan volume, tidak tahu)
- jagung (sebutkan volume, tidak tahu)
- minyak sawit (sebutkan volume, tidak tahu)
- karet (sebutkan volume, tidak tahu)
- kedelai (sebutkan volume, tidak tahu)

Pertanyaan ke-44. Metodologi apa yang Anda gunakan untuk menghitung volume setiap komoditas hutan berisiko yang Anda gunakan dalam tahun tertentu?

## Sistem uji tuntas

90. Ketentuan UU Lingkungan mewajibkan agar perusahaan-perusahaan dalam lingkup menetapkan dan melaksanakan sistem uji tuntas terkait dengan komoditas yang diatur yang mereka gunakan dalam kegiatan komersial mereka di UK. Ketentuan ini menetapkan bahwa sebagai bagian dari sistem uji tuntas ini, perusahaan dalam lingkup harus:
  - mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang komoditas yang diatur
  - menilai risiko bahwa peraturan lokal yang terkait dengan penggunaan dan kepemilikan lahan tidak dipatuhi sehubungan dengan komoditas yang diatur tersebut, dan
  - memitigasi risiko tersebut
91. UU Lingkungan memberikan kewenangan kepada Sekretaris Negara untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan tentang informasi yang harus diperoleh perusahaan tentang komoditas yang diperoleh, kriteria yang harus mereka gunakan dalam menilai risiko, dan cara mereka dapat memitigasi risiko.

## Tingkat mitigasi risiko

92. Mitigasi risiko adalah strategi untuk mengurangi kemunculan atau dampak dari akibat yang tidak diinginkan, seperti deforestasi ilegal.
93. Dalam beberapa kondisi, tidak ada toleransi untuk sesuatu akibat, dan jangan sampai tidak melakukan upaya mitigasi risiko agar akibat dapat dihindari. Dalam kasus lain, beberapa kemunculan akibat yang tidak diinginkan dapat diterima dan oleh karena itu, persyaratan mitigasi risikonya lebih ringan. Risiko dari suatu akibat tertentu yang tidak diinginkan dapat beragam juga, misalnya seiring waktu atau di berbagai wilayah geografis.
94. Persyaratan mitigasi dapat lebih tinggi jika kemunculan risiko akibat yang tidak diinginkan juga tinggi. Namun, jika risiko akibat yang tidak diinginkan itu rendah, persyaratan mitigasi dapat lebih ringan.
95. Menentukan tingkat mitigasi risiko dalam persyaratan uji tuntas akan memperjelas sejauh mana perusahaan-perusahaan harus bersiap untuk dan mengurangi kemungkinan komoditas hutan berisiko diproduksi di atas lahan yang dimiliki atau digunakan secara ilegal. Kami menerima masukan tentang ini melalui konsultasi tentang persyaratan utama dan keterlibatan lanjut dari pemangku kepentingan. Masukan ini menekankan bahwa menetapkan tingkat mitigasi risiko dalam legislasi yang harus dipatuhi perusahaan-perusahaan berperan penting dalam menyampaikan dampak kebijakan dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan memahami ekspektasi.
96. Kami mengusulkan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut dalam peraturan pelaksanaan. Ini akan mendukung dampak kebijakan dan kepatuhan perusahaan, sekaligus menjaga fleksibilitas untuk menyesuaikan tingkat risiko dalam peraturan pelaksanaan di kemudian hari jika hal ini harus dilakukan.

97. Di mana pun tingkat mitigasi risiko ditetapkan harus ada ruang untuk memasukkan komoditas hutan berisiko dan mengakomodasi kerumitan beberapa rantai pasok. Ini akan memastikan kami dapat mengatur komoditas yang paling signifikan dalam mendorong deforestasi, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan proses uji tuntas mereka ke rantai pasok mereka. Fleksibilitas ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien untuk menilai apakah risikonya tinggi, menengah, atau rendah dan mengatasinya dengan tepat karena tingkat mitigasi risiko akan mengakomodasi komoditas apa pun dan rantai pasoknya.
98. Kami mengusulkan agar mewajibkan perusahaan-perusahaan dalam lingkup untuk 'menghilangkan risiko atau mengurangi risiko menjadi serendah mungkin secara wajar' dalam hal risiko menggunakan komoditas yang diatur yang ditanam di atas lahan yang digunakan atau ditempati secara ilegal. Frasa ini memberikan fleksibilitas, sehingga memungkinkan kami untuk memasukkan komoditas hutan berisiko ke dalam lingkup, meskipun saat ini tidak mungkin untuk memitigasi risiko menjadi nol atau ke tingkat sangat rendah.
99. Ini juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam lingkup tidak perlu melakukan tindakan yang terlalu memberatkan atau mahal untuk menghilangkan risiko, misalnya, melakukan uji isotop untuk semua komoditas yang diatur. Namun, ini tetap memperjelas bahwa di mana ia dapat dilakukan secara wajar oleh perusahaan untuk menghilangkan risiko, perusahaan itu harus melakukannya.
100. Berhubung kewajaran tergantung pada konteks, kami memahami bahwa mungkin sulit bagi otoritas regulator maupun perusahaan dalam lingkup untuk menilai apa yang wajar, atau tidak wajar, dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, kami mengusulkan penggunaan panduan untuk menetapkan ekspektasi mengenai langkah-langkah yang wajar, serta informasi terkini tentang praktik terbaik. Ini akan mendukung perusahaan untuk mematuhi persyaratan dengan efisien dan memungkinkan otoritas regulator untuk menyetujui apa pun yang lebih rendah dari praktik terbaik jika dianggap dapat dilakukan secara wajar.
101. Kami berharap praktik yang dapat dilakukan secara wajar akan berkembang seiring waktu. Ekspektasi dan praktik terbaik yang ditetapkan dalam panduan dapat diperbarui seiring waktu untuk mencerminkan ini.

Pertanyaan ke-45. Apakah melalui peraturan pelaksanaan, perusahaan-perusahaan dalam lingkup harus diwajibkan untuk 'menghilangkan risiko atau mengurangi risiko serendah mungkin yang dapat dilakukan secara wajar'? Sebutkan alasan Anda.

- Ya
- Tidak

## Panduan sistem uji tuntas

102. Kami bermaksud untuk menggunakan panduan untuk membantu perusahaan-perusahaan memahami cara menerapkan sistem uji tuntas yang efektif. Ini termasuk informasi tentang cara-cara pendekatan yang dapat diterima untuk melakukan uji tuntas dan praktik terbaik.
103. Panduan sistem uji tuntas akan mencakup, misalnya, informasi tentang metrik untuk membantu perusahaan menentukan apakah ada risiko rendah, menengah, atau tinggi dari penggunaan dan kepemilikan lahan ilegal di sebuah negara atau wilayah negara sumber. Ini dapat mencakup indikator tentang perubahan penggunaan lahan, laju deforestasi, dan tata kelola. Penilaian ini kemudian dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menentukan jenis sistem mitigasi yang akan diterapkan.
104. Dalam laporan tahunan perusahaan (lihat bagian di bawah ini), perusahaan-perusahaan dalam lingkup akan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang cara mereka menilai dan memitigasi risiko di tempat sumber komoditas yang mereka gunakan.
105. Dalam panduan, kami juga dapat menyebutkan sumber-sumber daya yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu mereka memahami peraturan setempat terkait<sup>11</sup> yang berlaku di tempat produksi komoditas yang diatur.
106. Kami berharap bahwa hal yang dapat dilakukan secara wajar oleh sebuah perusahaan untuk menilai dan memitigasi risiko akan berkembang dengan berjalannya waktu seiring dengan meningkatnya sistem keterlacakan.
107. Contohnya, dalam tahun pertama persyaratan tersebut berlaku untuk komoditas tertentu, akan wajar bagi sebuah perusahaan untuk memberlakukan sistem mitigasi risiko dasar jika perusahaan telah mengidentifikasi risiko penggunaan dan kepemilikan lahan ilegal. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, perusahaan-perusahaan dapat diminta untuk mengarah ke informasi yang lebih mendetail tentang tempat produksi komoditas dan memberlakukan sistem mitigasi risiko yang lebih menyeluruh seiring dengan meningkatnya sistem keterlacakan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan skema-skema yang ada dapat juga memengaruhi tingkat mitigasi risiko yang dianggap wajar.
108. Kami dapat menggunakan dan memperbarui panduan untuk menetapkan cara-cara yang ada untuk menunjang kepatuhan, seperti skema sertifikasi, pasal-pasal kontrak, pemantauan aktif atas penggunaan lahan, dan uji isotop. Bagian berikut ini mencakup detail lebih lanjut tentang cara kami mengusulkan untuk mendukung perusahaan-perusahaan untuk menggunakan skema-skema dan standar-standar sertifikasi yang ada.

---

<sup>11</sup> Persyaratan uji tuntas dalam UU Lingkungan mendefinisikan 'peraturan setempat yang relevan', terkait dengan komoditas hutan berisiko, sebagai peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat organisme sumber ditanam, dikembangkan, atau dibudidayakan dan yang terkait dengan kepemilikan lahan tempat organisme sumber tersebut ditanam, dikembangkan, atau dibudidayakan atau terkait dengan penggunaan lahan tersebut. Kategori-kategori tambahan untuk peraturan setempat yang relevan tentang lahan dapat ditetapkan dalam peraturan di kemudian hari yang dibuat oleh Sekretaris Negara.

Pertanyaan ke-46. Hal mana dari berikut ini yang harus kami beri informasi dalam panduan untuk mendukung perusahaan-perusahaan dalam menetapkan sistem uji tuntas yang efektif? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- apa yang diminta dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat untuk mematuhi peraturan
- Contoh-contoh praktik terbaik untuk mendukung perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan sistem mereka
- metrik dan indikator untuk membantu menilai di mana ada risiko rendah, menengah, atau tinggi dari penggunaan dan kepemilikan lahan secara ilegal
- cara yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menilai dan memitigasi risiko
- sumber daya yang tersedia untuk membantu memahami kerangka hukum di negara-negara produsen
- lainnya (sebutkan)

## Skema dan standar sertifikasi

109. Kami berkomitmen untuk menetapkan jalur untuk mengakui skema-skema dan standar-standar sertifikasi yang ada sebagai alat untuk membantu memenuhi ketentuan uji tuntas, di mana hal ini memberi bukti legalitas, setelah konsultasi tentang persyaratan-persyaratan utama. Jalur ini seharusnya mendukung perusahaan-perusahaan untuk menilai dan menggunakan alat-alat yang ada jika relevan dan cukup kuat.
110. Kami mengusulkan untuk menetapkan dalam panduan tentang kerangka yang harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang diatur, untuk menilai yang mana dari standar-standar dan skema-skema sertifikasi yang ada yang dapat digunakan sebagai bukti legalitas. Kerangka ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan menggunakan suatu skema yang ada untuk mengumpulkan informasi tentang komoditas, menilai risiko ilegalitas, dan/atau memitigasi risiko jika perusahaan menilai bahwa skema tersebut memenuhi kriteria utama tertentu. Hal ini akan dimungkinkan tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan atas rantai pasoknya.
111. Kami tidak bermaksud untuk menyetujui skema-skema tertentu atau yang bernama dalam legislasi atau panduan pendamping tentang uji tuntas. Perusahaan-perusahaan akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan cara-cara yang paling sesuai dengan rantai pasok mereka, sekaligus menjaga integritas ketentuan uji tuntas dengan memastikan mereka menggunakan rantai pasok yang memenuhi kriteria kualitas minimum tertentu.
112. Pasar-pasar terkait berpengalaman dalam melakukan pendekatan berbasis kriteria dan proses akreditasi pihak ketiga yang sudah mapan sudah menilai skema. Oleh karena itu, menggunakan kerangka berbasis kriteria yang ditetapkan dalam panduan tidak boleh menaruh beban tidak wajar pada perusahaan-perusahaan dalam lingkup.



113. Jika negara-negara produsen telah menetapkan atau bermaksud menetapkan standar nasional untuk produksi berkelanjutan dari komoditas-komoditas yang diatur dibawah ketentuan uji tuntas UK, kami akan terus mendukung dan membantu memperkuat standar-standar tersebut untuk memberikan hasil lingkungan yang tangguh sekaligus mendukung ekonomi lokal. Sama halnya dengan standar atau skema sertifikasi lain, jika sebuah perusahaan dalam lingkup menganggap bahwa suatu standar nasional memenuhi kriteria kualitas minimum yang ditetapkan dalam panduan, perusahaan itu dapat menggunakannya untuk membantu memenuhi bagian-bagian yang relevan dalam kewajiban uji tuntasnya.

Pertanyaan ke-47. Apakah kami harus menetapkan dalam panduan tentang cara perusahaan dapat menggunakan sertifikasi dan standar yang ada untuk membantu memenuhi ketentuan uji tuntas?  
Sebutkan alasan Anda.

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

114. Kami ingin mengumpulkan pendapat tentang kriteria yang harus kami tetapkan dalam panduan untuk membantu perusahaan-perusahaan menilai apakah skema-skema dan standar-standar sertifikasi yang ada relevan dan cukup kuat untuk membantu mereka memenuhi ketentuan uji tuntas. Kriteria ini diusulkan dalam tabel 1.

---

**Tabel 1:** Kriteria yang diusulkan untuk membantu perusahaan-perusahaan menilai skema-skema dan standar-standar sertifikasi yang ada

Usulan kriteria	Deskripsi
Bukti legalitas	Skema harus memiliki komponen yang secara spesifik menilai dan memastikan apakah komoditas yang tersertifikasi telah diproduksi di atas lahan yang digunakan dan ditempati secara legal.
Rantai pengawasan <sup>12</sup>	Skema harus mensertifikasi komoditas atau produk turunan tertentu yang digunakan oleh perusahaan dalam lingkup dalam kegiatan komersial mereka di UK.
Kekuatan	Skema harus diaudit secara berkala dan independen.
Transparansi	Skema harus memberikan informasi terbuka tentang komponen, akreditasi, audit mereka, dll. Skema ini juga harus memberikan bukti atau informasi wajar kepada perusahaan-perusahaan tentang cara pengumpulan informasi dan menjamin bahwa komoditas atau produk turunan telah diproduksi secara legal.

115. Skema hanya dapat menawarkan jaminan parsial untuk legalitas komoditas tergantung pada cara mereka memenuhi kriteria tertentu atau model sertifikasi yang mereka gunakan.

116. Contohnya, melalui model keseimbangan massal, legalitas dari 70% dari komoditas atau produk turunan dapat disertifikasi sedangkan 30% sisanya tidak. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan skema sertifikasi untuk membantu menilai dan memastikan legalitas proporsi barang yang disertifikasi (70%) tetapi harus terus melakukan uji tuntas yang memadai atas barang sisanya yang tidak disertifikasi (30%).

Pertanyaan ke-48. Kriteria mana dari berikut ini yang harus kami tetapkan dalam panduan untuk mendukung penggunaan skema-skema dan standar-standar sertifikasi yang ada? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- bukti legalitas
- rantai pengawasan
- kekuatan
- transparansi
- lainnya (sebutkan)

<sup>12</sup> Rantai pengawasan adalah proses pendokumentasian kronologis atau 'jejak kertas' yang mencatat urutan pengawasan, pemindahan, penjualan, dll. dari sebuah bahan, seperti komoditas hutan berisiko, termasuk bukti fisik atau elektronik.

## Bukti lebih lanjut untuk menginformasikan ketentuan sistem uji tuntas

117. Kami bermaksud mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang praktik-praktik bisnis saat ini dan metrik serta cara yang tersedia untuk menilai dan memitigasi risiko. Ini akan membantu kami membuat panduan untuk mendukung kepatuhan dan menginformasikan durasi waktu yang disediakan bagi perusahaan-perusahaan untuk bersiap untuk peraturan.
118. Khususnya, kami tertarik perihal bukti lebih lanjut tentang:
- indikator atau metrik apa yang dapat digunakan untuk membantu menilai risiko penggunaan dan kepemilikan lahan ilegal di tingkat nasional dan daerah
  - cara apa yang digunakan atau dikembangkan untuk membantu menilai apakah komoditas telah diproduksi di atas lahan yang dimiliki dan digunakan secara legal, termasuk tantangan yang dikaitkan dengan cara-cara tertentu
  - sumber daya yang tersedia saat ini untuk membantu memahami kerangka hukum di negara-negara produsen
  - waktu yang dibutuhkan untuk beralih ke rantai pasok yang dijamin secara sah untuk komoditas dan produk turunan yang Anda gunakan

Pertanyaan ke-49. Berikan bukti yang relevan tentang praktik, cara, dan metrik bisnis saat ini yang tersedia untuk menilai dan memitigasi risiko.

119. Kami juga bermaksud mengumpulkan bukti tentang biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan uji tuntas terkait dengan skala bisnis dan penggunaan komoditas.
120. Khususnya, kami tertarik memperoleh bukti tentang:
- bagaimana biaya pelaksanaan uji tuntas dapat berbeda di antara perusahaan dengan omzet di UK lebih besar dari £50 juta, £100 juta, dan £200 juta
  - biaya spesifik komoditas untuk melaksanakan uji tuntas, dan perbedaan biaya menurut komoditas dan/atau antara produk turunan, mengingat variasi dan kompleksitas dalam rantai pasok
  - manfaat bagi perusahaan dari pelaksanaan uji tuntas, serta bukti tentang dampak pada konsumen terkait dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan uji tuntas
121. Bukti tentang hal ini diterima dari semua perusahaan yang terkait, apakah perusahaan-perusahaan dalam lingkup atau para pemasok atau para penyedia jasa kepada perusahaan-perusahaan dalam lingkup.

Pertanyaan ke-50. Apakah Anda dapat memberikan bukti tentang biaya pelaksanaan uji tuntas? Berikan perincian termasuk hubungannya dengan skala perusahaan.

Pertanyaan ke-51. Apakah Anda dapat memberikan bukti tentang biaya pelaksanaan uji tuntas untuk komoditas tertentu? Berikan perincian untuk jawaban Anda.

Pertanyaan ke-52. Apakah Anda dapat memberikan bukti tentang manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan uji tuntas untuk komoditas tertentu? Berikan perincian untuk jawaban Anda.

Pertanyaan ke-53. Jika Anda menjawab Pertanyaan ke-52, apakah manfaat-manfaat ini dapat dikuantifikasi? Berikan perincian untuk jawaban Anda.

Pertanyaan ke-54. Apakah Anda dapat memberikan bukti tentang biaya yang ditanggung konsumen dari perusahaan yang melaksanakan uji tuntas? Berikan perincian untuk jawaban Anda.

## Pelaporan tahunan

122. Perusahaan-perusahaan dalam lingkup harus membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan uji tuntas sehingga otoritas regulator dapat mengidentifikasi bagian-bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menggunakan sumber daya secara efisien untuk menginvestigasi kasus ketidakpatuhan yang mungkin terjadi. Laporan uji tuntas ini akan berbeda dari pelaporan bisnis oleh perusahaan di bawah UU Perusahaan.
123. Informasi dari laporan uji tuntas ini akan dipublikasikan untuk menunjang akuntabilitas lebih lanjut dan menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, misalnya oleh para konsumen yang bertanggung jawab dan oleh penyedia-penyedia jasa keuangan.
124. Kami bermaksud mengumpulkan pendapat tentang apa yang harus dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dan jenis informasi yang harus dipublikasikan.
125. Laporan bisnis harus menyajikan informasi tentang penggunaan komoditas dan produk turunan yang diatur, seperti volume yang digunakan, tanggal transaksi komersial, dan wilayah geografis yang menjadi sumber komoditas dan produk turunan tersebut. Untuk membantu otoritas regulator mengidentifikasi bagian-bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut, laporan mungkin harus juga mencakup informasi tentang melakukan penilaian risiko atas proses pencarian (sourcing) dan pendekatan mitigasi risiko yang telah digunakan.
126. Informasi lain yang terkait dengan mitigasi risiko dapat mencakup jejak penggunaan lahan oleh perusahaan, yang akan mencerminkan total luas tanah yang menjadi tempat penanaman, pengembangbiakan, atau pembudidayaan komoditas atau produk turunan yang digunakan. Ini akan membantu menunjukkan tingkat keterlacakan yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan.
127. Jika sebuah perusahaan hanya melacak komoditas yang digunakan sampai tingkat nasional, perusahaan tersebut mungkin akan memiliki jejak penggunaan lahan yang besar yang akan membutuhkan penilaian dan mitigasi risiko. Namun, jika sebuah perusahaan melacak komoditas sampai ke tingkat lebih mendetail, misalnya sampai tingkat daerah atau peternakan, perusahaan tersebut mungkin memiliki jejak yang lebih kecil yang membutuhkan penilaian dan memitigasi risiko.

128. Laporan bisnis juga dapat mencakup informasi tentang sengketa tanah, atau perincian mengenai keterlibatan dengan pemasok atau produsen yang tidak patuh, sehingga masalah-masalah tersebut dapat ditangani.
129. Perusahaan-perusahaan harus juga melaporkan tentang cara mereka melaksanakan uji tuntas. Ini mencakup informasi tentang cara pendefinisian dan penilaian risiko, jenis metrik yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan memitigasi risiko menurut komoditas dan negara sumber, dan jenis alat mitigasi yang digunakan pada jumlah komoditas yang diatur.

Pertanyaan ke-55. Apa saja yang wajib dilaporkan oleh perusahaan agar otoritas regulator dapat mengidentifikasi bagian-bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut?

Pertanyaan ke-56. Apakah informasi sensitif nonkomersial tentang pelaksanaan uji tuntas perusahaan harus dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor?

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-57. Informasi apa yang harus dipublikasikan tentang pelaksanaan uji tuntas perusahaan untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan?

## Penegakan

130. Penegakan peraturan uji tuntas yang efektif bersifat fundamental untuk memastikan kami memenuhi tujuan kebijakan kami untuk mengatasi deforestasi ilegal yang terjadi dan untuk menegakkan ketentuan larangan, sistem uji tuntas, dan pelaporan.
131. Ketentuan-ketentuan di dalam UU Lingkungan memberikan kerangka komprehensif bagi Sekretaris Negara untuk menetapkan skema penegakan terperinci melalui peraturan pelaksanaan. Aspek-aspek tertentu dari skema penegakan mengikuti preseden yang ditetapkan oleh peraturan dan praktik umum lain.

## Menetapkan otoritas penegakan

132. Sekretaris Negara dapat melakukan fungsi penegakan atau memberikan fungsi tersebut kepada badan atau badan-badan regulator (selanjutnya bersama-sama disebut 'otoritas penegakan'). Memberikan fungsi tersebut membuat otoritas penegakan dapat melakukan tugas-tugas yang relevan.

133. Satu atau lebih otoritas penegakan harus memiliki tiga fungsi utama:

- memantau kepatuhan perusahaan: contohnya, dengan menganalisis bukti yang disediakan melalui laporan uji tuntas tahunan dari perusahaan-perusahaan
- menginvestigasi kepatuhan: contohnya, dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan telah melanggar ketentuan larangan, uji tuntas, dan pelaporan
- menjatuhkan sanksi saat pelanggaran telah diidentifikasi untuk membawa perusahaan dalam lingkup kembali mematuhi legislasi, dengan menggunakan sanksi perdata yang ditetapkan dalam UU Lingkungan

134. Saat menentukan badan atau badan-badan regulator mana yang paling tepat ditugaskan untuk mengatur legislasi ini, sehingga menjadi otoritas penegakan, kami mempertimbangkan bahwa otoritas penegakan harus memenuhi kriteria berikut ini:

- Lingkup seluruh UK untuk memastikan bahwa otoritas penegakan memiliki kewenangan untuk beroperasi di seluruh wilayah teritorial penerapan peraturan ini.
- Memiliki kapasitas untuk mengatur lintas pusat-pusat keahlian sehingga penegakan peraturan dilaksanakan secara efektif.
- Kapabilitas dan pengalaman untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan investigasi kepatuhan serta menjatuhkan sanksi perdata apabila ketentuan dilanggar.

Pertanyaan ke-58. Kriteria mana yang harus dipenuhi oleh otoritas penegakan? Centang semua yang sesuai dan sebutkan alasan Anda.

- Lingkup seluruh UK
- kapasitas untuk mengatur
- kapabilitas dan pengalaman menerapkan
- lainnya (sebutkan)

## Gambaran skema penegakan

135. Sesuai dengan kerangka yang ditetapkan dalam UU Lingkungan, peraturan pelaksanaan akan memberikan detail tentang aspek-aspek skema penegakan berikut ini:

- cara Sekretaris Negara atau otoritas penegakan (selanjutnya bersama-sama disebut 'otoritas penegakan') dapat mengumpulkan informasi untuk secara efektif memantau kepatuhan
- cara otoritas penegakan menerima dan membagikan informasi kepada Sekretaris Negara, kepada pihak-pihak otoritas penegakan lain, dan kepada departemen-departemen di Pemerintah UK

- cara otoritas penegakan membagikan informasi melalui laporan-laporan tentang perusahaan-perusahaan yang diatur yang telah dijatuhi sanksi perdata
- cara otoritas penegakan dapat menginvestigasi kepatuhan. Ini akan mencakup detail tentang rangkai kewenangan investigatif standar dan cara kewenangan ini dapat digunakan oleh otoritas penegakan, termasuk keterbatasan-keterbatasan di dalamnya.
- cara otoritas penegakan dapat menjatuhkan sanksi perdata jika sebuah perusahaan telah melanggar peraturan agar pelanggar dapat kembali mematuhi peraturan
- jenis acara pidana yang dapat digunakan terhadap pelanggar yang telah gagal mematuhi sanksi perdata yang dijatuhkan, atau yang menghalangi atau gagal membantu otoritas penegakan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka
- proses banding yang disidangkan di First Tier Tribunal (Pengadilan Tingkat Satu) jika sebuah perusahaan menentang sanksi perdata atau pidana
- cara menetapkan biaya kegiatan penegakan terhadap perusahaan-perusahaan yang diatur Ini akan mencakup biaya yang sama untuk setiap perusahaan yang diatur untuk memperoleh kembali total biaya kegiatan penegakan setiap tahun

136. Kami mengusulkan untuk denda uang variabel, jumlah maksimumnya adalah £250,000, sesuai dengan skema-skema lainnya, seperti UU Gading.

137. Kami akan memberikan panduan bagi perusahaan-perusahaan tentang cara penerapan sanksi perdata.

Pertanyaan ke-59. Apakah maksimum denda uang variabel harus £250,000?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-60. Apakah Anda memiliki komentar lebih lanjut tentang skema penegakan?